

EVALUASI HASIL AKREDITASI SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DKI JAKARTA

Yulian Dinihari^{1)*}, Muchlas Suseno²⁾, Samsi Setiadi³⁾

- ¹⁾ Linguistik Terapan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawa Mangun Muka Raya, 13220
²⁾ Linguistik Terapan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawa Mangun Muka Raya, 13220
³⁾ Linguistik Terapan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawa Mangun Muka Raya, 13220

[*yuliandini07@gmail.com](mailto:yuliandini07@gmail.com)

Diterima: DD MM YYYY

Direvisi: DD MM YYYY

Disetujui: DD MM YYYY

ABSTRACT

School accreditation is a comprehensive assessment process of the feasibility and performance of an education program, but research on accreditation is rare. Therefore, the researchers took this research with the aim of obtaining information about the results of the accreditation of BAN Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta from the target to the problems of implementing accreditation. In carrying out school/madrasah accreditation, BAN-S/M is assisted by the Provincial National Accreditation Board for Schools/Madrasah (Provincial BAN-S/M). The method used in this study is qualitative using the evaluation model CSE-UCLA (Center for the Study of Evaluation- University of California in Los Angeles). The research subjects include the elected Secretary of BAN S/M 2019, assessors, and the secretariat of BAN S/M which is part of the DKI Jakarta Provincial Education Office. The results showed that the average achievement of successful accreditation in terms of performance was 99.59%. So it is included in the high category. From these results, out of a total of 650 accredited primary schools, 572 elementary schools or the equivalent of 88.00% got an A rating, as many as 71 elementary schools or the equivalent of 10.92% got a B rank, as many as 6 elementary schools or equivalent to 0.92% got a C rating, and there was still 1 elementary school or equivalent. 0.16% who still get an Unaccredited (TT) rating. So from this calculation, the accreditation of Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah is in the satisfactory category.

Keywords: Program Evaluation, accreditation results, Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah

ABSTRAK

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja suatu program Pendidikan, tetapi jarang ditemukan penelitian tentang akreditasi. Maka dari itu, peneliti mengambil penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang hasil akreditasi BAN Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah DKI Jakarta dari mulai sasaran sampai dengan permasalahan implementasi akreditasi. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA (Center for the Study of Evaluation- University of California in Los Angeles). Subjek penelitian meliputi Sekretaris terpilih BAN S/M 2019, asesor, dan sekretariat BAN S/M yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ketercapaian akreditasi berhasil dari sisi kinerja mencapai sebanyak 99,59%. Sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Dari hasil tersebut sebanyak dari total 650 SD yang diakreditasi menunjukkan 572 SD atau setara 88.00 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 71 SD atau setara 10.92 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 6 SD atau setara 0.92 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 1 SD atau setara 0.16 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi (TT). Maka dari perhitungan tersebut akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah masuk dalam kategori memuaskan.

Kata kunci: Evaluasi Program, Hasil Akreditasi, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah

PENDAHULUAN

A kreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. (Luhulima, 2007). Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Awaludin, 2017). Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 1 ayat 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa BANS/M adalah lembaga penilai independen yang menetapkan kelayakan pendidikan dasar dan menengah formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pasal 2 ayat 2) menetapkan bahwa BANS/M adalah lembaga nonstruktural, nirlaba, dan independen yang melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ada dua aspek penting dalam melakukan akreditasi yaitu instrumen akreditasi dan pengguna instrumen, evaluator. Para evaluator melakukan observasi dan evaluasi secara realistis, tanpa adanya manipulasi (Asmani, 2011). Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) dikembangkan dengan penekanan pada evaluasi kinerja sekolah/madrasah dan menggantikan Perangkat Akreditasi sebelumnya yang berfokus pada kepatuhan dokumen. Oleh karena itu, hasil akreditasi sangat bergantung pada validitas

instrumen dan keterampilan reviewer yang harus membuat serangkaian penilaian profesional (pengambilan keputusan, ada data dan fakta yang dilihat secara profesional) melalui wawancara, observasi, dokumentasi. review dan diskusi dengan seluruh elemen sekolah/madrasah dan berbagai pemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang menuntut kualitas pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tercermin melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.087/U/2012 pada tanggal 4 Juni 2002 telah diterbitkan ketetapan mengenai akreditasi sekolah yang baru, kalau dulu hanya sekolah swasta saja yang harus diakreditasi atau yang terkena peraturan tersebut, sedangkan sekarang sekolah negeri pun harus terakreditasi juga.

Bila kita merujuk kepada tujuan dari akreditasi itu sendiri, Akreditasi ini diadakan, bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, dan dijadikan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut (Antonius, 2017) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi), sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir (a) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi sebagaimana tercantum dalam pasal

12 ayat (6). Berdasarkan uraian di atas, BAN-S/M perlu menyusun Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, prinsip, norma, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 (pasal 1 ayat 6) dijabarkan bahwa madrasah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang meliputi, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Fokus penelitian ini adalah

hasil akreditasi yang terdapat di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Adapun pemelihan Provinsi DKI Jakarta, karena Jakarta merupakan Ibukota negara yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi Provinsi lain untuk mendapatkan hasil yang baik.

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di DKI Jakarta jika ingin mengusulkan untuk diakreditasi harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

1. Memiliki surat keputusan pendirian/operasional sekolah/madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana Pendidikan.
4. Memiliki Pendidikan dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
6. Telah menamatkan peserta didik.

Setelah hal itu sudah dimiliki oleh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Jakarta. Kemudian melaporkan kepada BAN-S/M Provinsi dibantu oleh sekretariat. Selanjutnya mekanisme akreditasi Sekolah

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut,

Hal pertama adalah penetapan sasaran Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di DKI Jakarta. BAN-S/M menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan data base BAN-S/M. BAP-S/M melakukan validasi terhadap data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi. Untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi semua persyaratan, BAP-S/M berkoordinasi dengan Disdik Provinsi dan Kanwil Kemenag. Hasil validasi yang dilakukan BAP-S/M dikirim kembali ke BAN-S/M untuk ditetapkan sebagai sasaran yang akan diakreditasi pada tahun berjalan.

Kedua, sosialisasi dan penyediaan perangkat akreditasi. Keputusan BANS/M mengenai biaya dan tujuan akreditasi diteruskan ke SD dan Madrasah Ibtidaiyah melalui keputusan BANS/M tentang biaya dan BAPS/M, Disdik dan Kanwil/Kankemenag. Tujuan kegiatan ini agar SD dan Madrasah Ibtidaiyah mempersiapkan akreditasi: (a) Mempelajari perangkat akreditasi, (b) Langkah dan jadwal pelaksanaan, (c) Tugas dan tanggung jawab sekolah/madrasah dan (d) Mengisi instrumen dan menyelesaikan pencadangan data.

Ketiga, mengisi dan menyerahkan perangkat akreditasi. SD dan Madrasah Ibtidaiyah mengunduh dan mempelajari dokumen perangkat akreditasi yang terdiri dari (a) perangkat akreditasi, (b) petunjuk teknis, (c) perangkat pendataan dan informasi pendukung, (d) penilaian dan klasifikasi hasil akreditasi. Kemudian, sekolah/madrasah melengkapi secara online melalui aplikasi: (a) Alat Akreditasi dan (b) Alat pendataan dan informasi pendukung, sesuai dengan kondisi nyata sekolah.

Kemempat, menentukan kelayakan SD dan Madrasah Ibtidaiyah di DKI Jakarta dan

menetapkan konsultan. BAPS/M mengunduh dan mengevaluasi hasil pendaftaran akreditasi sekolah/madrasah S/M Sispena untuk menentukan kelayakan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan sekolah/madrasah yang akan dikunjungi memenuhi persyaratan kelayakan. BAPS/M memaparkan hasil penetapan kelayakan kunjungan sekolah/madrasah dan menugaskan konsultan untuk melakukan kunjungan sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan.

Kelima adalah kunjungan ke SD dan Madrasah Ibtidaiyah di DKI Jakarta. Kunjungan merupakan kegiatan yang terdiri dari mengkaji dan mengklarifikasi isi perangkat akreditasi, perangkat pendataan dan informasi pendukung (IPDIP), mengacu pada petunjuk teknis kelengkapan perangkat akreditasi dan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas dan setting sekolah/madrasah. Keenam validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAP-S/M. laporan visitasi tersebut perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketujuh, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Setelah melakukan validasi proses dan hasil kunjungan, BAPS/M melakukan verifikasi terhadap hasil validasi dan membuat rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah.

Kedelapan penetapan hasil dan rekomendasi penyajian sertifikasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah ditetapkan melalui rapat paripurna BAPS/M yang dihadiri oleh anggota BANS/M yang dituangkan dalam SK. BAPS/M memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

Kesembilan edisi dan penyerahan sertifikat akreditasi. Hasil rapat paripurna BAPS/M dan BANS/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan yang disertai

dengan rekomendasi akreditasi. Isi SK tersebut memuat data seluruh sekolah dasar dan menengah yang terakreditasi, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sebagai bukti status akreditasi dan ranking yang diraih SD dan Madrasah Ibtidaiyah, BAPS/M menerbitkan dan mengirimkan sertifikat akreditasi ke masing-masing sekolah/madrasah yang terakreditasi.

Jadi yang terakhir adalah aliran sosialisasi ke-10 hasil akreditasi. Masyarakat harus memperoleh informasi status dan klasifikasi akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi harus diungkapkan oleh BANS/M dan BAPS/M kepada publik. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media, website, compact disc dan sarana lainnya. Sekolah/madrasah akan dinyatakan “terakreditasi” jika telah lulus tahap evaluasi dan dianggap memenuhi kriteria yang ditentukan.

Dengan adanya akreditasi sekolah diharapkan kualitas sekolah juga akan semakin baik, dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang baik dan memiliki prestasi belajar yang tinggi (Khafid, 2006). Hasil akreditasi ini akan berlaku sampai empat tahun ke depan. Melalui satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan.

Pada tahun 2019 BAN-S/M secara resmi menggunakan instrumen terbaru yaitu instrumen akreditasi 2019 yang merupakan penyempurnaan dari instrumen akreditasi sebelumnya. Sistem penilaian akreditasi menggunakan aplikasi berbasis web yang disebut dengan istilah SISPENA versi 2.0. Orientasi penilaian pada aplikasi ini yaitu menitikberatkan pada satuan dan performans (Busron & Rachmi, 2020). Harapannya dari hasil akreditasi ini menjadi referensi atau acuan

bagi pemerintah daerah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta.

Terdapat beberapa hasil-hasil penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, diantaranya adalah penelitian tentang penggunaan model CSE-UCLA dalam mengevaluasi. (Divayana, 2017). hasil penelitian ini yaitu secara umum tingkat efektivitas pelaksanaan blended learning di SMK TI Udayana sudah berjalan dengan baik, diantaranya pada komponen *system assessment* diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 86,7% sehingga termasuk tingkat efektivitas kategori tinggi, pada komponen program planning diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 85,6% sehingga termasuk tingkat efektivitas kategori tinggi, pada komponen program implementation diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 87,5% sehingga termasuk tingkat efektivitas kategori tinggi, pada komponen program improvement diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 88,5% sehingga termasuk tingkat efektivitas kategori tinggi, dan pada komponen program certification diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 88,9% sehingga termasuk tingkat efektivitas kategori tinggi.

Di atas adalah penelitian yang menggunakan model pendekatan yang sama. Sementara beberapa penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka ada juga beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya yaitu penelitian tentang Evaluasi Hasil Akreditasi Lembaga Paud Se-Kota Depok. Menggunakan metode kualitatif deskriptif kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam dari hasil temuan yang ada Hasil dari penelitian tersebut adalah umlah lembaga yang terakreditasi masih didominasi oleh lembaga PAUD dengan program TK, yakni sebanyak 97 lembaga dari 186 lembaga yang mengikuti akreditasi atau sebanyak 52% dari total lembaga PAUD yang mengikuti akreditasi; (2)

Terdapat ketidakmerataan jumlah lembaga yang terakreditasi di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, dibuktikan dengan fakta bahwa kecamatan Sukmajaya jauh lebih unggul dibandingkan kecamatan lainnya dalam jumlah lembaga yang terakreditasi; dan (3) Nilai akreditasi tinggi dan rendah tidak selalu berkaitan dengan lama berdiri, luas lahan dan pengalaman lembaga dalam melaksanakan akreditasi, dibuktikan dengan masih ada lembaga yang berhasil memperoleh nilai akreditasi A meskipun berdiri kurang dari 5 tahun, luas lahan kurang dari 100 meter persegi dan belum berpengalaman melaksanakan akreditasi sebelumnya (Oktaria et al., 2019).

Dengan adanya penelitian yang terdahulu, tetapi belum ada yang menggunakan model CSE-UCLA sebagai model penelitian dalam mengevaluasi hasil akreditasi. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti evaluasi hasil akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di DKI Jakarta menggunakan metode evaluasi CSE-UCLA dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Khususnya bagi BAN-S/M lembaga mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang analisis hasil akreditasi lembaga Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, karena dalam pelaksanaan evaluasi ini akan mencari informasi yang dalam dan luas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari suatu objek yang dievaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi evaluatif/evaluasi, karena ingin mengevaluasi suatu program/kegiatan dalam satu unit tertentu (Arikunto, 2013), dalam hal ini adalah hasil akhir akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh BAN S/M untuk unit sekolah dasar yang ada di Jakarta.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CSEUCLA Center for the Study of Evaluation (CSE) dan model University of California, Los Angeles (UCLA). Menurut (Fernades, 1984), model CSEUCLA melalui empat tahap, yaitu: (1) penilaian kebutuhan, (2) perencanaan program, (3) penilaian formatif, dan (4) penilaian sumatif.

Objek yang akan diteliti adalah hasil akhir laporan akreditasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta tahun 2019. Pemilihan tersebut terjadi pada tahun sebelumnya karena dinilai lebih layak untuk konsumsi masyarakat dan tidak menyinggung etika dalam pemerintahan. Subyek yang terlibat dalam penelitian ini adalah Sekretaris BAN S/M dan Sekretaris BAN S/M yang merupakan bagian dari pegawai Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

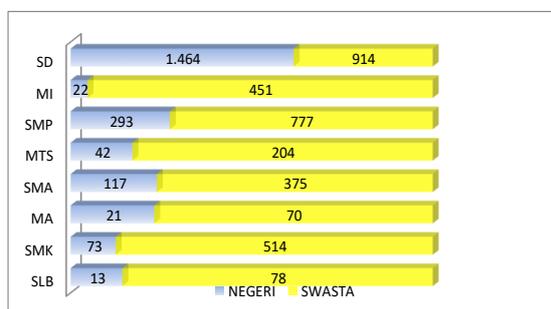
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik intensional sampling, yaitu subjek yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi dalam hal ini BAN S/M. Alasan penggunaan teknik *purposive sampling* dikarenakan teknik ini sangat tepat digunakan untuk mendapatkan informasi akurat berdasarkan pertimbangan tertentu dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai program yang sedang dievaluasi. (Divayana, 2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi hasil akreditasi SD BAN dan Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta dari kelompok sasaran hingga permasalahan pelaksanaan akreditasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sholikhah & Soenarto, 2014) yang menyatakan bahwa “menyatakan bahwa “Teknik sampling penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian evaluasi menggunakan model CSE-UCLA yang fokus pada hasil akreditasi Sekolah/Madrasah di Provinsi DKI Jakarta, maka ada beberapa hal yang telah dievaluasi di antaranya dari populasi sekolah madrasah yang ada di DKI Jakarta. Kemudian sasaran seluruh sekolah, Ketersediaan anggota BAN-S/M dan tim sekretariat. Jumlah asesor dari semua tingkat sekolah. Penyebaran asesor ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Faktor pendukung, hambatan, dan temua sekolah madrasah yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Populasi Sekolah/Madrasah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan sumber data dapodik, data EMIS dan data Internal BANSM Provinsi DKI Jakarta pada bulan November 2020 sebanyak 5.428 S/M. Dijelaskan dalam diagram yang ada pada gambar di bawah ini.



Sumber : BAN-S/M Kemendikbud

Gambar 1. Diagram Populasi Sekolah/Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.

Dari data gambar di atas kita dapat melihat bahwa terdapat tingkatan sekolah dimulai dari dasar hingga menengah atas kejuruan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di enam wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut kemudian terbagi lagi menjadi sebaran Sekolah Negeri dan Swasta serta terdapat juga Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta.

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling banyak yaitu 2.851 di antara tingkatan sekolah lain. Seperti dibandingkan dengan

Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.316. kemudian disusul dengan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah sebanyak 1171. Selanjutnya yang terakhir adalah Sekolah Luar Biasa sebanyak 91 sekolah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan jabarkan yang lebih spesifik tentang fokus penelitian yaitu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Disebutkan bahwa terdapat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2851, yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri sebanyak 1464. Sekolah Dasar Swasta sebanyak 914. Kemudian terdapat Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebanyak 22 dan Madrasah Ibtidaiyah swasta sebanyak 451. Terdapat enam wilayah yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya adalah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.

Dengan lebih rinci lagi yang terbagi dalam enam wilayah, yaitu Jakarta Utara Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 349. Madrasah Ibtidaiyah dan Swasta sebanyak 70. Jakarta Timur Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 640. Madrasah Ibtidaiyah dan Swasta sebanyak 130. Jakarta Barat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 559. Madrasah Ibtidaiyah dan Swasta sebanyak 118. Jakarta Selatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 498. Madrasah Ibtidaiyah dan Swasta sebanyak 139. Jakarta Pusat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 278. Madrasah Ibtidaiyah dan Swasta sebanyak 15. Kemudian yang terakhir adalah Kepulauan Seribu dengan banyaknya Sekolah Dasar Negeri sebanyak 14 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebanyak 1 sekolah.

Dari banyaknya Sekolah/Madrasah yang terdapat dalam Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua BANSM No. 125/BAN-SM/SK/2019 Tentang penetapan 11 Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Provinsi DKI Jakarta masa tugas 2019-2022 tertanggal 4 Februari 2019. Namun pada bulan Juli salah satu anggota BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri dikarenakan menjadi pejabat struktural pada Kantor Kementerian Agama Wilayah. Maka terdapat sebanyak 10 Anggota BAN-S/M Provinsi DKI berasal dari berbagai unsur profesi dalam bidang pendidikan. Dimulai dari Guru, Pensiunan Pengawas, Pengawas, Dosen, dan Praktisi Pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya anggota BAN-S/M dibantu oleh tim sekretariat yang sudah ditetapkan sebanyak 7 orang. Terbagi menjadi 3 UPKK, 2 TIM IT, dan 2 orang sekretariat. Masing-masing menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah ditunjukkan kepada mereka. Sekretariat dibentuk dalam rangka mendukung program dan kegiatan di BAN-S/M Provinsi. Sekretariat BAN-S/M Provinsi DKI berkedudukan di LPMP DKI Jakarta, Wisma Anyelir 4, Lt.2 Jl. Nangka Raya 60, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekretariat BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta.

Akreditasi tidak dapat berjalan hanya dari kelembagaannya saja, tetapi harus ada orang yang bekerja langsung mewakilinya untuk terjun langsung ke lapangan. Maksudnya lapangan di sini adalah sekolah dan orang yang mewakili dinamakan asesor. Asesor merupakan sumber daya yang dimiliki oleh BAN S/M dan menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan BAN S/M dalam melaksanakan tugas yakni menilai kelayakan satuan pendidikan. Meskipun dalam hubungan tugas seorang asesor adalah mitra dari BAN S/M, tetapi peran mereka sangat strategis karena para asesorlah yang memiliki kewenangan untuk turun langsung bersentuhan dengan satuan pendidikan untuk menilai tingkat kelayakan satuan pendidikan yang divisitasi. Sebagai sumber daya yang sangat penting perannya, asesor berada di garda terdepan dalam melaksanakan proses penilaian kelayakan sekolah apakah telah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum.

Begitu vitalnya tugas asesor dalam kegiatan visitasi, BAN S/M selalu berusaha menjaga mereka dari segala sisi baik norma,

etika dan integritasnya. BAN SM menyadari betapa rentannya posisi asesor terutama saat visitasi ke satuan pendidikan. Sebagai upaya untuk menjamin objektivitas hasil akreditasi, BAN S/M selalu membekali para asesor dengan standar Norma dan Etika yang harus dipegang oleh asesor saat sedang bertugas visitasi ke satuan pendidikan. Namun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang tidak sesuai harapan dapat terjadi dalam serangkaian proses akreditasi.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Asesor (UKA) tahun 2020 diperoleh 94 asesor yang dinyatakan lulus UKA dari 245 peserta yang memenuhi syarat mengikuti UKA. Dari jumlah 94 yang dinyatakan lulus UKA selanjutnya berhak mengikuti pelatihan asesor IASP tahun 2020. Berdasarkan hasil pelatihan diperoleh 90 asesor yang dinyatakan lulus. Sehingga asesor berdasarkan jenjang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 90 orang dengan sebaran sebagai berikut,

Tabel 1. Asesor Berdasarkan Jenjang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

NO	Jenjang	JP	JB	JU	JS	JT	Kep. Seribu	Jumlah
1	SD/MI	4	9	7	7	14	-	41
2	SMP/MTS	2	3	3	3	9	-	20
3	SMA/MA	-	2	1	7	4	-	14
4	SMK	1	1	3	4	4	-	13
5	SLB	-	-	-	1	1	-	2
Jumlah		7	15	14	22	32	-	90

Sumber : BAN-S/M Kemendikbud

Penyebaran asesor per wilayah kota sebagaimana tabel di atas tidak didasarkan pada domisili asesor, tetapi didasarkan pada tempat tugasnya mengingat sebagian besar asesor tidak berdomisili sama dengan tempat tugasnya. Asesor terbanyak yang memiliki sertifikat bertugas di wilayah Jakarta Timur (35,55%) diikuti wilayah Jakarta Selatan (24,44%). Wilayah Jakarta Barat 16,66 %, Jakarta Utara 15,55 % dan wilayah Jakarta Pusat 7,77%. Jika dilihat berdasarkan jenjang, asesor jenjang SD memiliki jumlah 41 Asesor dengan prosentase 45,6%. Hal ini mengingat jumlah SD/MI di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai

2.851 S/M. Diikuti jenjang SMP/MTS sebanyak 1.316 S/M dengan jumlah asesor 20, atau 22,22%. Berikutnya untuk SMA terdapat 14 asesor atau 15,6% dan asesor SMK sebanyak 13 orang atau 14,44%. Sedangkan untuk jenjang SLB dengan 91 lembaga yang ada hanya memiliki 2 asesor atau 2,22% dari keseluruhan jumlah asesor yang ada.

Dengan data asesor yang ada untuk jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 41 orang. Maka jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak yang telah diakreditasi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebanyak 709 S/M seperti terlihat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 2. Data Hasil Peringkat Akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Satuan Pendidikan	Status Peresentase			
	A	B	C	TT
SD	88,00%	10,92%	0,92%	0,16%
MI	45,76%	40,69%	11,86%	1,69%
JUMLAH	84,49%	13,40%	1,83%	0,28%

Sumber : BAN-S/M Kemendikbud

Berdasarkan tabel 1. di atas Hasil dan Peringkat Akreditasi SD/MI pada tahun 2019, terlihat bahwa dari total 709 SD/MI yang diakreditasi menunjukkan sebanyak 599 SD/MI atau setara 84.49 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 95 SD/MI atau setara 13.40 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 13 SD/MI atau setara 1.83 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 2 SD/MI atau setara 0.28 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi (TT). Khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), terlihat bahwa dari total 650 SD yang diakreditasi menunjukkan sebanyak 572 SD atau setara 88.00 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 71 SD atau setara 10.92 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 6 SD atau setara 0.92 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 1 SD atau setara 0.16 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi

(TT). Sedangkan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), terlihat bahwa dari total 59 MI yang diakreditasi menunjukkan sebanyak 27 MI atau setara 45.76 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 24 MI atau setara 40.68 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 7 MI atau setara 11.86 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 1 MI atau setara 1.70 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi (TT).

Berdasarkan sebaran wilayah Pada tahun 2019, untuk jenjang SD/MI yang diakreditasi terbanyak di wilayah Kota Jakarta Timur dengan 190 S/M (29,23%), diikuti wilayah Jakarta Barat 177 S/M (27,23%) dan Jakarta Selatan 158 S/M (24,30%), sedangkan yang paling sedikit adalah Sekolah yang berada di Kepulauan Seribu dengan 4 S/M.

Adapun penilaiann yang dilakukan berdasarkan analisis hasil akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan capaian mutu per standar. Di lihat dari capaian standar mutu dari 8 Standar Nasional pendidikan, dapat digambarkan, sebagai berikut,

Tabel 3. Capaian Standar Mutu SD/MI

No	Capaian Standar	SD	MI
1	Standar Isi	95,12	91,24
2	Standar Proses	92,80	88,42
3	Standar Kelulusan	93,70	88,22
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	86,44	80,08
5	Standar Sarana dan Prasarana	90,04	83,19
6	Standar Pengelolaan	93,77	86,93
7	Standar Pembiayaan	92,97	91,29
8	Standar Penilaian	94,68	89,54

Sumber : BAN-S/M Kemendikbud

Rata-rata capaian standar mutu SD dari sejumlah sekolah yang diakreditasi tahun 2019 untuk setiap standar di atas 87%, yang tertinggi pada standar isi mencapai 95,12%, dan yang terendah pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) hanya mencapai 86,44% dan Standar Sarana Prasarana mencapai 90,4 %. Kekurangan capaian mutu SD/MI pada standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) hanya mencapai 86,44% adalah sertifikat pendidik bagi guru, kesesuaian mengajar guru dengan latar belakang pendidikan, kesesuaian mengajar guru mapel dengan latar belakang pendidikan, pemenuhan persyaratan kepala sekolah, kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan, kualifikasi tenaga administrasi, dan petugas yang melaksanakan layanan khusus.

Sementara itu kekurangan yang terdapat dalam standar sarana dan prasarana adalah, luas lahan, luas lantai bangunan, prasarana, ruang kelas (jumlah, ukuran, dan sarana), perpustakaan sekolah, alat peraga pembelajaran, ruang guru, ruang UKS, gudang, lahan bermain, kantin, dan lahan parkir. Maka dari hal yang sudah disebutkan di atas kedua standar tersebut memiliki nilai paling rendah. Setiap tingkatan sekolah berbeda-beda hasil standarnya sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh asesor kepada anggota BAN-S/M.

Maka dari itu, beberapa permasalahan implementasi akreditasi, dimulai dari faktor pendukung sebagai berikut

1. Pengakuan dari sekolah/madrasah terhadap Badan Akreditasi S/M sebagai lembaga penilai kelayakan mereka.
2. Semangat yang tinggi dari sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi mereka.
3. Kompetensi yang cukup tinggi dari berbagai aspek terutama kemampuan mengoperasikan IT yang dimiliki oleh para asesor.
4. Dukungan finansial yang cukup yang dimiliki BAN-S/M dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.
5. Sinergi antara stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akreditasi.

Hambatan

Tidak ada sesuatu hal yang sempurna pada saat melakukan sebuah evaluasi, Beberapa hambatan terjadi pada saat pelaksanaan akreditasi sekolah, yaitu:

1. Kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi sispna pada tiap-tiap satuan pendidikan berbeda-beda.
2. Penarikan data dari sistem EMIS pada madrasah maupun Dapodik pada sekolah terkadang masih menemui kesulitan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama pada saat pengisian Sispna.
3. Tidak didukungnya sekretariat dengan sarana perkantoran, peralatan kerja, sarana dan peralatan kerja yang ada saat ini milik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Temuan terhadap Sekolah Madrasah

Terdapat temuan di lapangan ketika akan mengevaluasi sekolah, di antaranya sebagai berikut:

1. Masih dijumpai beberapa satuan pendidikan yang menolak untuk diakreditasi dikarenakan sedang mengalami pembangunan gedung sehingga harus pindah ke tempat lain.
2. Masih ada beberapa sekolah/madrasah yang belum selesai melakukan pengisian DIA sispna sehingga asesor membutuhkan waktu yang relatif panjang pada saat visitasi.
3. Masih adanya sekolah/madrasah pada saat mengisi DIA sispna tidak sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah hal ini dikarenakan sepenuhnya pengisian DIA sispna diserahkan kepada operator yang belum sepenuhnya memahami 8 SNP.
4. Masih dijumpai beberapa sekolah/madrasah yang memiliki kesenjangan yang cukup tinggi nilai antara EDS dalam DIA sispna dengan nilai asesor, terutama pada standar PTK, Sarana dan prasarana, serta pembiayaan, hal ini dikarenakan sekolah/madrasah kesulitan pada saat menarik data dari sistem emis pada madrasah dan dapodik pada sekolah, Dan atau dikarenakan sekolah/madrasah terburu-buru pada saat pengisian EDS dalam DIA sispna karena diserahkan oleh operator.

Dari hasil seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai

dengan Prosedur Operasional Standar (POS). Hampir seluruh Sekolah/Madrasah yang menjadi target sasaran dapat dilaksanakan akreditasinya termasuk sasaran baru dan hanya 19 S/M dari kuota 1576 atau setara 1,2 % Sekolah/Madrasah yang tidak diakreditasi. Dengan adanya kebijakan prioritas pada sasaran baru dapat diperoleh data S/M yang selama ini tidak mengindahkan akreditasi. Dari sisi kinerja maupun anggaran BANSM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 99,59%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini pelaksanaan akreditasi sekolah secara umum telah dijalankan dengan baik. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah terdapat prinsip-prinsip akreditasi sekolah yang harus dijalankan. Hal ini terbukti pada tahun 2019 BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta berhasil dari sisi kinerja mencapai sebanyak 99,59%. Dari hasil penelitian ini sebanyak terlihat bahwa dari total 650 SD yang diakreditasi menunjukkan sebanyak 572 SD atau setara 88,00 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 71 SD atau setara 10,92 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 6 SD atau setara 0,92 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 1 SD atau setara 0,16 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi (TT). Sedangkan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), terlihat bahwa dari total 59 MI yang diakreditasi menunjukkan sebanyak 27 MI atau setara 45,76 % mendapatkan peringkat A, sebanyak 24 MI atau setara 40,68 % mendapatkan peringkat B, sebanyak 7 MI atau setara 11,86 % mendapatkan peringkat C, serta masih ada 1 MI atau setara 1,70 % yang masih mendapatkan peringkat Tidak Terakreditasi (TT).

Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan analisis hasil akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan capaian mutu per standar. Rata-rata capaian standar mutu SD dari sejumlah sekolah yang diakreditasi tahun 2019 untuk setiap standar di atas 87%, yang

tertinggi pada standar isi mencapai 95,12%, dan yang terendah pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) hanya mencapai 86,44% dan Standar Sarana Prasarana mencapai 90,4 %.

Terdapat beberapa faktor yang ada selama proses akreditasi yaitu, faktor pendukung, faktor hambatan, dan temuan-temuan terhadap Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi DKI Jakarta. Semoga kedepannya hal ini tidak dapat ditemukan lagi. Jadi Pendidikan di Indonesia lebih bernilai dan bermutu tinggi.

Adapun beberapa rekomendasi diharapkan bahwa sebagai Sekolah/madrasah akan lebih antusias dan lebih bersemangat lagi dalam mempersiapkan akreditasinya jika mulai tahun 2020 dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta bidang pendidikan madrasah kantor wilayah kementerian agama provinsi DKI Jakarta melaksanakan surat edaran direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 0993/D/PR/2018, pada point 6 bahwa mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi. Penyempurnaan segera sistem dapodik dan EMIS oleh instansi terkait guna mengefektifkan dalam pengisian DIA sispena oleh sekolah/madrasah. Kepada Dinas pendidikan dan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti terutama bagi sekolah/madrasah yang memperoleh nilai akreditasi Tidak Terakreditasi (TT) dan sekolah/madrasah yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya, tetapi tidak mengikuti akreditasi ulang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para anggota BAN-S/M beserta jajarannya di Provinsi DKI Jakarta yang telah berkontribusi aktif dan rela meluangkan waktu untuk membantu memperoleh data. Semua

bersikap profesional selama peneliti meminta bantuan.

4(3).
<https://doi.org/10.21831/jpv.v4i3.2560>

REFERENSI

- Antonius, A. (2017). PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR NEGERI. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 14(2).
<https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.44>
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT Rineka Cipta.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
<https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 1.
<https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335>
- Divayana, D. G. H. (2017). Evaluasi pelaksanaan blended learning di SMK TI Udayana menggunakan model CSE-UCLA. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/jpv.v7i1.12687>
- Fernades, H. J. X. (1984). *Evaluation of Educational Programs*. National Education Planning, Evaluation and Cultural Development.
- Khafid, M. (2006). PENGARUH AKREDITASI SEKOLAH DAN PERSEPSI GURU MENGENAI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA. *Dinamika Pendidikan*, 1(1).
<https://doi.org/10.15294/dp.v1i1.466>
- Luhulima. (2007). *Dasar dan Teknik Reseach Pendidikan Dasar*. Penerbit Tarsito.
- Oktaria, R., Hamid, L., Yuningsih, Y., & Suparti, S. (2019). EVALUASI HASIL AKREDITASI LEMBAGA PAUD SE-KOTA DEPOK. *Journal of Early Childhood Education (JECE)*, 1(2), 16–28.
<https://doi.org/10.15408/jece.v1i2.12888>
- Sholikhah, R., & Soenarto, S. (2014). Evaluasi program talent scouting guru SMK tahun 2013 Direktorat P2TK Dikmen Kemdikbud. *Jurnal Pendidikan Vokasi*,